

**PENGAWASAN KETERTIBAN LALU LINTAS OLEH DINAS PERHUBUNGAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SIAK
(Studi Kasus Jembatan Sultan Syarif Hasyim, Perawang)**

Oleh :
Yuli Puspita Wulandari
Email : yulikhadgar@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. Zaili Rusli. SD, MSi

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl.H.R.Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The bridge of Sultan Syarif Hasyim is a bridge in Siak, Tualang Perawang that was built in 2010. The Bridge Of Sultan Syarif Hasyim has a beautiful view so that many merchants who sell and also many vehicles stopped at the bridge. it is a violation of traffic signs that are dangerously to the safety of other road users. There are also the car with an overloaded freely passing on this bridge. Based on this, the researchers are interested to review how control by the department of transportation.

The concept of the theory used is control, proposed by Brantas 2009 which assesses control based on four indicators, that is: define the standards that will be used for monitoring, measuring performance or achievements, comparing performance or results to standards and determine deviations if any take corrective action, if there is a deviation for the implementation and objectives according to plan. The purpose of this research is to know the control by the transportation department of information and communication on the bridge of Sultan Syarif Hasyim, Perawang, as well as any factors that influence it. This research uses a qualitative method with an assessment of descriptive data. In gathering the data the researcher used interview, observation and documentation based on purposive sampling method and analysis by triangulation techniques.

The outcome of this research showed that the control of traffic order that made by the transportation department of information and communication is not as expected, if seen by the number of violations that had done by staff and road users. The department of transportation and the traffic unit should be able to act decisively to these merchants, the road users and the car with an overloaded that violate the rules by giving the punishment and placing it in a trade location and suitable for them to sell. So that the bridge of Sultan Syarif Hasyim, Perawang can be function as should as.

Key words: controlling,

PENDAHULUAN

Dewasa ini pengaruh era globalisasi telah mempengaruhi peningkatan kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut dapat dirasakan dari berbagai bidang dan dapat mengakibatkan dampak tersendiri bagi roda kehidupan masyarakat umumnya. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari semakin komplitnya peningkatan teknologi yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Karena tanpa adanya teknologi kehidupan manusia bisa dikatakan akan lambat dan bisa dikatakan sebagai masyarakat primitive (awam). Salah satu dari perkembangan teknologi tersebut dapat kita lihat dari peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang dapat diukur dari segi jumlahnya, bentuknya, bahkan fungsinya yang semakin hari semakin meningkat.

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu (**Miro, 2005:4**). Kemudian transportasi juga mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Secara perkembangan dan peningkatan transportasi tidak hanya dapat dirasakan saja, akan tetapi juga harus di atur pengelolaannya. Maka dari itulah dibutuhkan suatu pengelolaan yang lebih baik lagi oleh lembaga yang berwenang sebagai pengatur lalu lintas yaitu Dinas

Perhubungan Informasi Komunikasi. Karena apabila tidak dilakukan pengaturan akan pengelolaannya tentu hal tersebut dapat mengakibatkan kesemrawutan dalam pengoperasiaannya, terutama dalam hal ketertiban umum. Pada dasarnya ketertiban adalah keadaan yang serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk mencapai suatu yang diinginkan bersama yaitu terciptanya suasana yang tentram dan damai (**S. Gaulama, 1983**).

Pada dasarnya untuk ketertiban umum di jalan raya sering terbentuk dikarenakan sikap dan tata cara masyarakat dalam mempergunakan fasilitas umum dengan tidak bertanggung jawab, seperti ugal-ugalan dalam berkendara, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mempergunakan infrastruktur jalan tidak sesuai dengan fungsinya, sehingga jalan tersebut seperti tidak teratur dan tidak diatur pengelolaannya, padahal pemerintah daerah telah berupaya membentuk dan mengelola keadaan daerahnya dengan sebaik mungkin dengan menyediakan fasilitas umum sebagai penunjang aktivitas masyarakat khususnya. Keadaan pelanggaran ketertiban umum yang dilihat dari segi lalu lintas dapat kita sorot dari keadaan lalu lintas yang terjadi di salah satu jembatan yang ada di kabupaten siak yaitu Jembatan Sultan Syarif Hasyim Perawang. Jembatan Sultan Syarif Hasyim Perawang merupakan jembatan terpanjang yang ada di provinsi Riau (pangean online). Sedangkan untuk keberadaannya jembatan ini cukup vital dan sangat berpengaruh dalam perjalanan lalu lintas

antar daerah, sehingga keberadaannya dapat memangkas jalur transportasi darat antara daerah yang dilaluinya terutama menuju Kabupaten Siak. Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, Jembatan Sultan Syarif Hasyim menurut jenis jalannya merupakan salah satu jenis jalan dengan

kelas jalan III C dengan ketentuan umumnya yaitu, bagi kendaraan yang akan melintasi jalan tersebut hanya dibolehkan untuk kendaraan yang memiliki muatan maksimal 8 ton, sedangkan untuk lebar kendaraannya tidak melebihi 2,1 meter, serta panjang tidak boleh melebihi 9 meter.

Namun dalam kenyataannya, keadaan sehari-harinya dari jembatan tersebut masih banyak kendaraan yang melintas dengan muatan berlebih dari ketentuan yang telah ditetapkan. Terutama bagi bus-bus, truk, dan kendaraan besar lainnya yang masih membawa muatan bawaannya di atas 8 ton. Selain itu di jembatan tersebut juga terjadi permasalahan berupa pelanggaran lalu lintas terutama dalam hal pelanggaran rambu lalu lintas. Jenis dan bentuk dari rambu-rambu lalu lintas di jembatan tersebut terdiri dari dua bentuk yaitu gambar dan tulisan. Dimana untuk rambu lalu lintas yang berbentuk gambar dapat dilihat dari gambar larangan melintasi jalan dengan muatan sumbu terberat (MST) di jembatan Maredan ialah 8 ton. Sedangkan rambu lalu lintas yang berbentuk kalimat dapat dilihat dari kata-kata yang berisikan “dilarang berhenti di jembatan atau memarkirkan kendaraan”.

Dari kedua bentuk peringatan yang telah dibuat, kebanyakan dari masyarakat yang mempergunakan jalan tersebut tidak menghiraukannya. Sehingga dalam kesehariannya tidak sedikit dari masyarakat yang selalu berhenti di tengah jembatan ketika melintasi jembatan. Padahal jika dilihat dari tujuannya mereka berhenti disana hanya sebagai tempat nongkrong saja, dan sebagai tempat berfoto-foto. Kemudian permasalahan lainnya juga terjadi di jembatan tersebut yaitu pemanfaatan jalan/jembatan sebagai lahan untuk berdagang. Apabila dilihat dari keadaan sorenya banyak sekali pedagang yang berjualan di jembatan tersebut sehingga membuat keadaan jembatan menjadi sempit,

rame, dan tidak teratur sesuai fungsinya. Melihat dari keadaan gambar di atas tentu banyak orang menilai bahwa jembatan tersebut tidak dikelola dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 37 Tahun 2002 pasal 2 bagian e tentang ketertiban umum dijelaskan bahwa adanyalarangan untuk tidak meletakkan atau menempatkan/memarkir semua jenis kendaraan, gerobak, becak dan sepeda di jalan, jalur hijau, taman-taman, tempat-tempat umum, dan disepanjang kaki lima pertokoan, kecuali pada tempat-tempat parkir yang telah disediakan/ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atau di jalan-jalan yang tidak ditentukan larangan. Selain itu juga pada perda siak nomor 09 tahun 2011 tentang pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, dan petunjuk pada ruas jalan dalam kabupaten siak/ kota siak sri indrapura pasal 4 bahwa untuk keperluan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam Kabupaten atau kota Siak, ditetapkan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan seperti larangan berhenti disepanjang jalan disertai papan tambahan kecuali darurat.

Maka dengan keadaan yang demikian berdasarkan masalah-masalah yang terjadi di jembatan Sultan Syarif Hasyim Perawang, maka dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Oleh Dinas Perhubungan Informasi, Komunikasi Kabupaten Siak** dengan studi kasus Jembatan Sultan Syarif Hasyim Perawang, dalam hal ini pembinaan dan pengawasan, mengingat begitu pentingnya peran dan fungsi jalan tersebut yang berdasarkan posisinya merupakan jalan utama (jalan lintas) yang sering dilalui oleh berbagai masyarakat untuk menjangkau daerah yang akan dikunjunginya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada di latar Belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana “Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas oleh Dinas Perhubungan Informasi Komunikasi Kabupaten Siak (Studi kasus jembatan Sultan Syarif Hasyim, Perawang)?
2. Apa Saja Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas oleh Dinas Perhubungan Informasi Komunikasi kabupaten Siak (Studi kasus jembatan Sultan Syarif Hasyim, Perawang)?

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas oleh Dinas Perhubungan Informasi Komunikasi kabupaten Siak (studi kasus jembatan Sultan Syarif Hasyim).
- b. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas oleh Dinas Perhubungan Informasi Komunikasi Kabupaten Siak (Studi kasus jembatan Sultan Syarif Hasyim).

2. Kegunaan Penelitian

Keguan penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis, praktis dan akademis yaitu:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang Administrasi dalam hal ini yaitu mengenai Administrasi Negara yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan.

- b. Secara Praktis, sebagai bahan masukan khususnya bagi dinas perhubungan informasi komunikasi kabupaten siak dalam meningkatkan pengawasan ketertiban lalu lintas.
- c. Secara Akademis, dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

Konsep Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi dan preposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena. Menurut **Siswoko dalam Mardalis (2002:42)** mengemukakan bahwa teori diartikan sebagai perangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. Berdasarkan hal tersebut, maka berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis ungkapkan.

1. Konsep Kinerja

Menurut **Wirawan (2009 : 5)** konsep kinerja merupakan singkatan dari Kinetika Energi Kerja yang dalam bahasa inggris ialah “performance” yaitu: Keluaran yang dihasilkan.

Agar pencapaian kinerja optimal, **Mangkunegara (2007 : 67-68)**, mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja yaitu:

1. Faktor Kemampuan (ability)

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge+skill). Artinya, setiap pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang

diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan sesuai dengan keahliannya.

2. Faktor motivasi (Motivation)

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik (siap rencana mental, fisik, tujuan dan situasi). Artinya, seseorang pegawai harus memiliki sikap mental, fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, maupun memanfaatkan, dan menciptakan situasi kerja.

Pengertian kinerja pegawai itu sendiri adalah kemampuan seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya, serta pertanggung jawaban seorang pegawai terhadap wewenang yang telah diberikan kepadanya dengan target tercapainya tujuan suatu organisasi atau instansi tempat dia bekerja secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan indikator dari variabel kinerja pegawai, **Wirawan (2009:80)** memberi indikator kinerja yang terdiri dari:

1. Keterampilan kerja,
2. Kualitas pekerjaan,
3. Tanggung jawab
4. Prakarsa
5. Disiplin kerja
6. Kerjasama
7. Kemampuan

2. KONSEP PENGAWASAN

Istilah pengawasan dan pengendalian keduanya merupakan terjemahan dari satu istilah bahasa Inggris “controlling” yang merupakan salah satu fungsi manajemen dan semula diterjemahkan dengan kata pengawasan yang berarti suatu proses untuk memastikan apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara umum pengawasan merupakan suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa saja yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan

Menurut **George R. Terry (2006:395)** menyebutkan bahwa pengawasan sebagai determinasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apa bila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen dari manajemen diantara fungsi manajemen, perencanaan (planning), dan pengawasan (controlling), memiliki peran yang sangat penting, dalam fungsi perencanaan, ini dasarnya adalah menetapkan mengenai apa yang harus dicapai pada periode tertentu serta tahapan untuk mencapainya. Dengan demikian dapat dilakukan tindakan perbaikan (corrective action). Sehingga pengawasan dapat berperan mengukur kemajuan kearah tujuan untuk mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tersebut tepat pada waktunya untuk melakukan tindakan perbaikan sebelum penyimpangan semakin menjadi.

Menurut **Marnis (2008:329)** pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja actual sesuai dengan standar dan tujuan organisasi yang diharapkan. Arti penting pengawasan adalah:

- a. Pengawasan menyediakan suatu kepercayaan kembali kepada pihak luar bahwa suatu organisasi berjalan lancar.
- b. Pengawasan menyediakan jaminan kepada manajer bahwa organisasi

yang dipimpinnya berjalan sesuai dengan arah manajer inginkan.

- c. Pengawasan memungkinkankan manajer membimbing bawahannya.
- d. Pengawasan yang menyediakan bimbingan kepada manajer pada tingkat yang lebih rendah oleh manajer yang lebih tinggi.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

2.1 PROSE PENGAWASAN

Untuk melaksanakan pengawasan maka harus di lihat beberapa tahap atau langkah dari pengawasan tersebut, menurut **Manullang (2006:186)** proses pengawasan tersebut terdiri dari:

1. Menetapkan alat pengukuran (standar) yang berupa:
Standar dalam bentuk fisik yang

terdiri dari:

- a. Kuantitas hasil produksi
- b. Kualitas hasil produksi
- c. Waktu

Standar dalam bentuk uang

- a. Standar biaya
 - b. Standar penghasilan
 - c. Standar investasi
- Standar intangible

2. Mengadakan penilaian

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti:

- a. Dari laporan tertulis yang disusun bawahan baik rutin atau laporan istimewa
- b. Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaannya atau bawahan dipanggil untuk membeberkan laporannya

3. Mengadakan tindakan perbaikan

Tindakan ini dilakukan bila pada fase sebelum dapat dipastikan terjadinya penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka:

- a. Pertama-tama haruslah dianalisis yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu.
- b. Harus diketahui terlebih dahulu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu.
- c. Bila sudah dapat ditetapkan dengan pasti sebab-sebab terjadinya penyimpangan baru diambil tindakan perbaikan.

Proses pengawasan menurut Sabarudin (2001:154) yang meliputi beberapa langkah:

- a. Penentuan pedoman pekerjaan
- b. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan
- c. Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga pekerjaan tersebut sesuai dengan yang direncanakan
- d. Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sejalan dengan pandangan diatas pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai sasaran dan objek yang diperiksa.

Selanjutnya dikemukakan oleh **T. Hani Handoko (1995 : 5)** bahwa proses pengawasan memiliki lima tahapan, yaitu:

1. Penetapan standar pelaksanaan.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan

Menurut **Handoko (1998)**, proses pengawasan biasanya terdiri dari paling sedikit ada lima tahap (langkah). Tahap-tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digambarkan sebagai standar. Adapun bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran produksi.

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh sebab itu, langkah kedua dalam proses pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:

- a. Pengamatan (observasi)
- b. Laporan-laporan, baik lisan dan tertulis
- c. Metode-metode otomatis dan
- d. Inspeksi, pengujian (test), atau

Menurut **Brantas (2009:195)** proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui:

- a. Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan.

- b. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
- c. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan
- d. menentukan penyimpangan jika ada.

2.3 Tipe-tipe pengawasan

Menurut **manullang (2009:5)** pengawasan merupakan salah satu fungsi administrasi dan manajemen yang sangat penting dilaksanakan pada setiap organisasi. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada tiga tipe pengawasan yaitu :

- a. Pengawasan pendahuluan (feed forward control). Pengawasan pendahuluan atau sering disebut steering control, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control). Pengawasan ini sering disebut pengawasan “Ya-Tidak”, screening control atau berhenti-terus, dilakukan selama sesuatu kegiatan berlangsung.
- c. Pengawasan umpan balik (feed back control) pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai past-action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Menurut **Brantas (2009:198)** Repressive control ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan hasil dengan rencana

2. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikan
3. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya
4. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada
5. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksanaan
6. Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksanaan melalui training atau education.

Menurut **winardi (2006:161)** faktor-faktor yang mengharuskan adanya pengawasan adalah:

1. Sasaran-sasaran individu dan organisasi biasanya berbeda (adanya pengawasan untuk memastikan bahwa anggota-anggota bekerja kearah sasaran-sasaran organisatoris)
2. Pengawasan diperlukan dikarenakan terdapat adanya suatu keterlambatan antara waktu sasaran dan sewaktu mereka direalisasikan.

3. KONSEP LALU LINTAS

Lalu lintas merupakan objek dari bidang pembinaan dan pengawasan lalu lintas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut **Julianto (2008)** Rambu lalu lintas adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.

menurut **Yosi Alwinda (2007 : 1)** mengemukakan permasalahan lalu lintas dapat disebabkan oleh:

1. Banyaknya kendaraan/orang/hewan di jalan.
2. Kapasitas jaringan jalan tidak memadai.

3. Lintasan jalan tidak layak dari segi perencanaan jalan (geometrik dan konstruksi)

Selanjutnya **Yosi Alwinda (2007 : 2)** mengemukakan permasalahan lalu lintas mengakibatkan:

1. Tundaan dan lalu lintas macet.
2. Lalu lintas semerawut.
3. Kecelakaan lalu lintas.

Menurut **Alik Ansyori alamsyah (2008 : 7)** yang memengaruhi lalu lintas adalah:

1. Manusia sebagai pengemudi.
2. Kendaraan.
3. Jalan.

Menurut **Yosi Alwinda (2007 : 3)** untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dipengaruhi oleh:

- a. Rambu-rambu.
- b. Keadaan jalan.
- c. Marka Jalan
- d. Alat pemberi isyarat
- e. Alat pengendali/alat pengamanan pengguna jalan.
- f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- g. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dari angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar. (UU. Lalu Lintas Jalan dan Angkutan No. 22 Thn. 2009)

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa lalu lintas adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang, hewan, dan jaringan jalan dalam melaksanakan kegiatan. Kegiatan tersebut ditangani langsung oleh dinas perhubungan infokom pada bidang pembinaan dan pengawasan untuk menertibkan lalu lintas jalan pada kendaraan angkutan transportasi.

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Informasi

Komunikasi kab Siak. Adapun objek penelitian ini dilakukan di pos jaga dishub di jembatan Sultan Syarif Hasyim tepatnya di daerah Perawang kabupaten Siak. Dipilihnya daerah ini sebagai lokasi penelitian dengan alasan keingintahuan peneliti bagaimana pengawasan Dinas perhubungan Informasi komunikasi kab Siak bidang Pembinaan dan Pengawasan di sub bagian ketertiban lalu lintas dan angkutan di jembatan Sultan Syarif Hasyim dan penulis menemukan terjadinya fenomena yang memperlihatkan bahwa tugas dan fungsi pegawai BINWAS dalam menangani masalah mengenai lalu lintas di jembatan Sultan Syarif Hasyim belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dan efisien.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk melakukan pengukuran yang cermat dan sistematis terhadap fenomena-fenomena sosial dengan cara memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan di lapangan mengenai pengawasan ketertiban lalu lintas oleh dinas perhubungan informasi dan komunikasi di jembatan Sultan Syarif Hasyim, Perawang.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan penelitian sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam kinerja pegawai dinas perhubungan infokom kabupaten siak bidang Pembinaan dan pengawasan khusus sub bagian ketertiban lalu lintas dan angkutan di jembatan Sultan Syarif Hasyim kabupaten Siak. Adapun informan dari penelitian ini adalah :

- a. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- b. Kepala seksi ketertiban lalu lintas dan angkutan.
- c. Koordinator pengawasan arus lalu lintas jembatan sultan syarif hasyim perawang.

- d. Staf anggota pengawasan arus lalu lintas jembatan sultan syarif hasyim perawang.
- e. Masyarakat setempat dan pengguna jalan.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung di dapat dari obyek penelitian dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan bidang pembinaan dan pengawasan ketertiban lalu lintas pada jembatan Sultan Syarif Hasyim, Perawang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data informasi serta keterangan yang diperoleh dalam bentuk print out atau sudah jadi dari instansi atau dinas terkait dengan tujuan memperoleh data yaitu mengenai:

1. Gambaran umum Dinas Perhubungan Informasi Komunikasi kab. Siak.
2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Informasi Komunikasi bidang Penmbinaan dan Pengawsan.
3. Fungsi dan Tujuan Pokok Pegawai Bidang Pembinaan dan Pengawasan lalu lintas.
4. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Infformasi Komunikasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung yang bersifat sementara terhadap objek dan subjek penelitian mengenai

permasalahan pada penelitian ini, dilakukan karena peneliti ingin mengetahui dan melihat langsung fenomena yang ada.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan data dari dokumen yang ada di lokasi penelitian berupa arsip, foto-foto atau gambar informan dan aktivitasnya yang berguna untuk memperkuat data primer yang ada.

c. wawancara

wawancara yaitu melakukan dialog atau percakapan tanya jawab secara bebas terhadap informan sehingga mendapatkan informasi sesuai keinginan atau sesuai tujuan wawancara. Menurut **Mulyana (2004:180)** wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

6. Analisis Data

Menurut **Sugiyono (2012:89)** analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu merupakan suatu cara menganalisa data yang telah tersedia pada

objek penelitian dan membandingkan dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan. Selanjutnya disajikan dalam bentuk analisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi kabupaten Siak.

Menurut **Brantas (2009:195)** proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui:

- a) Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan
- b) Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
- c) Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan
- d) menentukan penyimpangan jika ada.

a. Menentukan Standar-Standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan

Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi administrasi dan manajemen yang dilakukan dengan beberapa tahapan pemantauan untuk mengetahui bahwa tujuan-tujuan manajemen dan organisasi apakah kinerja aktualnya sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan. Menentukan standar-standar apa saja yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengawasan sebagai dasar ukuran dalam pelaksanaan pengawasan serta dalam menentukan terhadap tindakan penyimpangan atau pelanggaran. Standar ini meliputi standar organisasional dan pelaksanaan teknis dilapangan yang mana segala bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dilapangan diatur sedemikian rupa oleh standar-standar operasionalnya. Pengawasan ketertiban lalu lintas dijembatan Sultan Syarif Hasyim, Perawang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Informasi Komunikasi Kabupaten Siak yang

mana di dalamnya terdapat beberapa bagian unit kerja yang melakukan pengawasan terhadap para pengguna jalan yaitu berupa patroli. Dalam melakukan sistem pengawasannya menggunakan dua macam sistem yaitu sistem stationer dengan mengadakan pos-pos penjagaan pada setiap lokasi jembatan-jembatan yang ada di kabupaten siak dengan melakukan pemantauan, penjagaan dan pengaturan agar pelaksanaan tertib berlalu lintas berjalan dengan lancar.

Pengawasan stationer ini dilakukan dengan menganalisis dan perkiraan lokasi-lokasi yang strategis untuk diadakannya pos-pos penjagaan, seperti di daerah sekitar jembatan, berdasarkan hasil analisis dan perkiraan tersebut dapat diketahui penetapan lokasi-lokasi dimana saja akan dibuat pos-pos penjagaan yang memudahkan para petugas pengawas dalam melakukan pengawasannya, sejauh ini ada 3 buah pos penjagaan yang ada di ruas jalan sekitar jembatan-jembatan yang ada di kabupaten siak. Selanjutnya sistem mobile yaitu dengan melakukan patroli keliling baik menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta melakukan pemantauan, penjagaan serta pengaturan agar terlaksana tertib lalu lintas yang aman dan lancar serta tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi.

Dengan sistem mobile ini petugas pengawasan melakukan patroli dan memantau keadaan lalu lintas di wilayah patrolinya jika ada masalah yang timbul di jalan seperti macet, pelanggaran lalu lintas serta kecelakaan, maka petugas pengawas turun langsung melakukan penindakan, pengaturan serta penjagaan. Pelaksanaan standar operasional prosedur pengawasan ini berlaku pada para petugas lapangan yang melakukan pengawasan di jembatan Sultan Syarif Hasyim, Perawang. Biasanya dilakukan penilaian secara berkala yaitu dalam waktu enam bulan sekali, dimana dalam pelaksanaan tugas dinilai

sebagaimana hasil kinerjanya apabila sudah sesuai dengan standar operasionalnya atau belum, dari hasil penilaian tersebut dilakukan evaluasi terhadap kinerja para petugas pengawasan lapangan jembatan Sultan Syarif Hasyim, Perawang maka akan dilakukan penindakan baik berupa teguran lisan, tertulis, maupun sanksi terhadap kelangsungan karirnya atau jabatannya. Sedangkan untuk pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan menggunakan 2 tindakan yang dilakukan seperti wawancara berikut ini dengan petugas lapangan jembatan Sultan Syarif Hasyim, Perawang.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) secara pelaksanaan teknis di lapangan. Dalam pelaksanaan standar operasional prosedur pengawasan ini berlaku pada para pengguna jalan/jembatan. Pelaksanaan standar operasional pengawasan ini dilakukan didalam kegiatan berlalu lintas dengan melakukan patroli, pemantauan, penjagaan. Apabila ada penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan para pengguna jalan/jembatan maka akan dilakukan penindakan baik berupa teguran lisan, tulisan dan sanksi atau pun penilangan bagi pengguna jalan/jembatan yang melakukan pelanggaran. Berikut wawancara dengan masyarakat sekitar jembatan Sultan Syarif Hasyim, Perawang.

Permasalahan yang terjadi di dalam berlalu lintas sepanjang jembatan Sultan Syarif Hasyim, Perawang disebabkan para pengguna jalan yang kurang memiliki kesadaran akan keselamatan berlalu lintas. perlengkapan transportasi apa saja yang digunakan dinas perhubungan dalam melaksanakan pengawasan. Dengan diwakili 2 unit sepeda motor yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan ketertiban lalu lintas dirasa cukup efektif karena 1 unit sepeda motor digunakan untuk berpatroli rutin pagi dan sore dan untuk melapor ke

kantor sedangkan yang 1 unit stan by di pos penjagaan yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga.

b. Mengukur Pelaksanaan atau Hasil yang dicapai

Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai yaitu menilai hasil pelaksanaan pengawasan seberapa besar tingkat keberhasilan dari pengawasan yang dilakukan. Dari analisis hasil pengukuran pelaksanaan kita dapat menilai sejauh mana tingkat efektifitas dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan, melalui hasil analisis ini kita dapat mengetahui dimana saja letak kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan yang telah dilakukan dan kita dapat merancang kembali perencanaan pengawasan yang sedemikian rupa berdasarkan perbaikan-perbaikan dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk pelaksanaan ketertiban lalu lintas di jembatan sultan syarif hasyim, perawang memang sudah dilakukan terbukti sudah dilakukannya patrol rutin setiap hari dengan pembagian waktu kerja akan tetapi hasilnya belum sesuai atau pun belum tercapai dengan baik karena masih ada pelanggaran yang terjadi di jembatan sultan syarif hasyim, perawang.

c. Membandingkan Pelaksanaan atau Hasil dengan Standar dan menentukan penyimpangan jika ada.

Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada yaitu membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar pelaksanaan dan pencapaian apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Dan menentukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan. Melalui tahap ini dapat disimpulkan atas perbandingan yang kita lakukan antara hasil yang dicapai dengan standar pelaksanaan

dan pencapaian yang menjadi dasar pengukuran, apakah hasil dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar pelaksanaan dan standar pencapaiannya dan menentukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya jika ada.

pelaksanaan pengawasan sudah dilakukan sesuai prosedur hanya saja pengguna jalan yang kurang mempunyai kesadaran akan tertib berlalu lintas dan membahayakan keselamatan sendiri dan orang lain. Mengenai mobil besar yang melintas berikut wawancara dengan petugas lapangan sekitar jembatan Sultan Syarif Hasyim, Perawang. masih ada petugas lalu lintas yang melakukan penyimpangan demi keuntungan pribadi. Tindakan petugas yang seperti ini sangat perlu diberi tindakan tegas agar tidak mengulangi hal yang sama kepada supir-supir mobil besar. Hal ini sangat merusak citra dinas terkait. Baru-baru ini juga 3 petugas honorer pos jaga dinas perhubungan informasi komunikasi di jembatan maredan, perawang tertangkap melakukan pungli terhadap mobil bertonase tinggi.

d. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan yang telah dilaksanakan dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap masalah-masalah yang ada baik itu pelanggaran atau penyimpangan, melengkapi kelemahan dan kekurangan yang terjadi di jembatan Sultan Syarif Hasyim, Perawang. Tindakan perbaikan yang dilakukan oleh dinas perhubungan informasi dan komunikasi kabupaten siak ialah berupa memperketat penjagaan, mempertegas sanksi jika melakukan penyimpangan.

B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pengawasan Kertiban Lalu Lintas Oleh

**Dinas Perhubungan Informasi
Komunikasi Kabupaten Siak(Studi kasus
di jembatan Sultan Syarif Hasyim,
Perawang)**

Faktor-faktor penghambat merupakan bagian dari pada proses pengawasan yang dilaksanakan. Bagian ini merupakan masalah yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan yang dapat menjadi penghalang dari keberhasilan pengawasan itu sendiri, masalah-masalah tersebut bisa timbul dari internal, pelaksanaan pengawasan, maupun yang diawasi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan berbagai macam hambatan-hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan dari pengawasan itu sendiri yang antara lain:

1. Kurangnya Sumberdaya Manusia (SDM) dan tingkat pendidikan terakhir.

permasalahan yang timbul yang dapat menjadi penghalang dalam keberhasilan dalam melaksanakan pengawasan di jembatan sultan syarif hasyim, perawang yang sangat terlihat yaitu kurangnya personil yang melakukan pengawasan, penjagaan dan patroli. Didalam sebuah organisasi atau instansi merupakan hal yang sangat mendasar bahwa kebutuhan akan sumberdaya manusia sangatlah vital apabila suatu organisasi atau instansi mengalami kekurangan sumberdaya manusia yang berkompeten dibidangnya atau tidak sebanding pekerjaan yang bertugas dengan kapasitas atau jumlah pekerja yang ia kerjakan akan memungkinkan pekerjaan pekerjaan yang dikerjakan hasilnya akan kurang baik atau kurang maksimal. Didalam permasalahan ini jumlah petugas yang melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli.

2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pengguna jalan

permasalahan yang umum kita ketahui mengenai kurangnya pengetahuan

dan kesadaran akan berkendara yang baik dan aman yang dapat menjadi penghambat dari terlaksana pengawasan yang diharapkan. Dalam permasalahan ini hambatan yang timbul merupakan masalah yang cukup sulit untuk membenahinya. Dalam pelaksanaan pengawasan sangat diperlukan adanya kesadaran antar pengawas dengan apa yang diawasi melalui kerja sama yang baik antara keduanya akan memudahkan kelancaran pelaksanaan pengawasan. kesadaran para pedagang kurang akan adanya rambu lalu lintas yang ada di sekitar jembatan sultan syarif hasyim perawang ini. Mereka hanya mementingkan keuntungan dari dagangannya ketimbang keamanan, ketertiban dan keselamatan. Bukan hanya para pedagang tetapi pengguna jalan yang berhenti disepanjang jalan juga akan kesadaran mengenai rambu lalu lintas berupa peringatan. Kurangnya kesadaran para pengguna jalan merupakan masalah yang memang harus dibenahi

karena memang sebenarnya pengguna jalan lah yang membuat jembatan sultan syarif hasyim, perawang sembrabut yang bisa saja berpotensi kecelakaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegak peraturan lalu lintas harus menjadi teladan bagi masyarakat yang berkendara. Instansi maupun petugas yang bertugas mengawasi ketertiban lalu lintas haruslah mempunyai sifat yang lugas, menjadi pengawas di jalan raya bukanlah hal yang mudah melainkan menjadi hal yang rumit karena harus tegas dan berwibawa. Masyarakat ataupun pengguna jalan masih banyak yang melanggar lalu lintas dengan tidak sengaja maupun sengaja. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas atau tata tertib lalu lintas, sehingga masyarakat menyepelekan keselamatannya sendiri bahkan bisa berdampak terhadap keselamatan orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa pengawasan tertib lalu lintas di jembatan Sultan Syarif Hasyim, perawang yang dilakukan oleh dinas perhubungan informasi komunikasi belum maksimal dikarenakan masih cukup banyak pelanggaran yang terjadi. Untuk petugas lapangan masih ada yang melakukan penyimpangan untuk keuntungan pribadi. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengawasan Tertib lalu lintas oleh dinas perhubungan informasi komunikasi kabupaten siak di jembatan Sultan Syarif Hasyim, Perawang ditemukan ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambatnya yaitu:

1. Sumber daya manusia atau petugas yang mengawasi unit pengaturan, penjagaan, dan patroli yang ada pada dinas perhubungan informasi komunikasi kabupaten siak dalam bidang pembinaan dan pengawasan masih kurang berwawasan karena rata-rata tingkat pendidikan terakhir yaitu SD dan SMP. Kinerja suatu anggota juga akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Karena biasanya dengan pendidikan yang diperoleh akan merubah pola pikir dari setiap manusia sehingga apa yang menjadi tugasnya akan dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab.
2. Kurangnya akan kesadaran dari para pengguna jalan akan keselamatan dalam berlalu lintas khususnya di jembatan Sultan Sayarif Hasyim, Perawang ini. Bisa dilihat dengan tidak pedulinya pengguna jalan akan rambu-rambu lalu lintas yang ada berupa peringatan dan larangan berhenti dan memarkirkan kendaraannya di sepanjang jembatan

dan dilarang berjualan dan mobil besar dilarang melintas. Hal ini akan menghambat terlaksanannya pengawasan yang diharapkan.

3. Masih terjadi penyimpangan oleh petugas jaga yang ada dilapangan.

B. Saran

Dari permasalahan yang ada maka peneliti dapat memberikan saran-sarann sebagai berikut:

1. Untuk keselamatan bersama dibutuhkan kesadaran dan kerjasama yang baik antara petugas pelaksanaan pengawasan dengan pengguna jalan. Selain itu juga dibutuhkan koordinasi antara stlantas dan dinas terkait untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif.
2. Untuk penyimpangan yang dilakukan oleh petugas lapangan harus diberi teguran bahkan sanksi yang tegas agar penyimpangan tidak terulang kembali.
3. Untuk rekrutmen pegawai perlu direvisi kembali minimal SMA atau jenjang pendidikan lainnya yang lebih tinggi.
4. Mungkin lebih baik dipasang portal untuk mobil bertonase besar yang harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi riau karena pembangunan jembatan sultan syarif hasyim, perawang ini merupakan budget sharring APBD Riau 70% dan 30% APBD Siak.
5. Untuk pengawasn petugasnya mungkin dengan cara pemasangan CCTV di pos jaga, karena bisa memantau aktifitas petugas setiap saat, apa lagi jika jaringan terkoneksi ke kantor dinas perhubungan siak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Ansyori Alik. 2008. Rekayasa lalu lintas. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Alwinda, Yosi. 2007. Rekayasa lalu lintas. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Ur
- Bungin, Burhan. 2005. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Brantas, 2009. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dessler, Gary. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Indeks.
- Handoko, T. Hani. 1995. manajemen edisi kedua. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Ilyas, yaslin. 1999. Kinerja Teori Penilaian dan Penelitian. Jakarta: PT. GramediaPustakaUtama.
- Jannah, Dewi. 2014. Human Relation dalam Organisasi. Pekanbaru: Alaf Riau
- Manullang. 2005. Dasar – dasar manajemen. Yogyakarta: gadjah madha univ. Press.
- Mardalis, 2002. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, 2002. Organisasi dan Motivasi. Bandung. Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. 2006. Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan. Yogyakarta: UGM Press.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia Edisi Revisi. Jakarta: Rienka Cipta.
- Prabu, Anwar Mangkunegara. 2005. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung: Aditama.
- Prabu, Anwar Mangkunegara. 2000. Kinerja Pegawai. Pustaka Media : Jakarta. Bandung: Aditama.
- Prawirosentono, Sayudi. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan. Kiat membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia. Yogyakarta: BPFE.
- Ruky, Achmad, 2004. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: Gramedia.
- Raharjo, M. Dawam. 1993. Intelektual Intelegensi dan perilaku politik bangsa. Bandung. Rienka Cipta.
- . Sugiono, 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta
- Syfiie, Inu Kencana, 2006. Ilmu Administrasi Publik. PT. Rineka Cipta
- Usman, Husain dan Akbar, Purnomo Setiady. 2002. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Wirawan. 2009. Evaluasi kinerja sumber daya manusia. Jakarta :BumiAksara.